

MEMBACA ULANG KAMPUNG PERKOTAAN

Imelda I. Damanik¹, Bakti Setiawan², M. Sani Roychansyah³, Suyoto Usman⁴

1. Prodi Teknik Arsitektur, FAD UKDW, Yogyakarta; Mahasiswa Pasca Sarjana S3 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

2 & 3. Departemen Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

4. Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: imelda@staff.ukdw.ac.id, imeldamanik@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Keberadaan kampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkembangan perkotaan di Indonesia. Dikenal dengan istilah kampung perkotaan, bagian kota ini menjadi pembahasan yang menarik dari waktu ke waktu karena didalamnya tergambar ruang kehidupan perkotaan yang penuh dengan dinamika. Kampung perkotaan akan memberikan informasi mengenai apa dan siapa yang mendiaminya, serta pergumulan yang dihadapi dalam mempertahankan kehidupan di situasi yang serba terbatas. Urbanisasi memberikan tekanan pada penyediaan ruang hunian dan kampung memberikan alternatif bagi para pendatang. Ruang-ruang kampung perkotaan memberikan kesempatan untuk bertahan dalam tekanan hidupan perkotaan diberbagai bidang. Nilai sebuah ruang dalam kampung perkotaan dapat dilihat dari beberapa cara pandang; pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan oleh masyarakat kampung itu sendiri. Setiap aktor yang membaca kampung perkotaan akan menggunakan prespektif masing-masing, sehingga perlu didiskusikan bagaimana cara memandang kampung dengan cara yang lebih komprehensif. Tulisan ini akan memberikan review mengenai cara mengkaji kampung perkotaan berdasarkan pada referensi mengenai kampung perkotaan. Kajian-kajian mengenai kampung perkotaan akan dievaluasi dengan menggali komponen-komponen yang disusun dan dijadikan sebagai konsep pembentuk kampung perkotaan. Review ini diharapkan akan memberikan penjelasan isi kampung perkotaan dari berbagai sisi dan dalam beberapa level, agar dapat digunakan sebagai acuan dalam memposisikan kampung dalam dinamika perkotaan.

Kata kunci: kampung kota, permukiman kota, konsep, komponen dan struktur kampung kota.

Abstract

Title: Re-reading Urban Kampung

The existence of the informal settlement is an integral part of urban development in Indonesia. Known as urban kampung, this urban section becomes an interesting discourse over decades, because it reflects the dynamic of urban life in urban spaces. Urban kampung provides the story of people who live in, what their activities and how they struggle and sustain their life in a limited situation. The pressure of urbanization is providing settlement, housing for immigrants. The urban kampung provide an alternative for them to stay and start they live on the urban area. Urban kampug's spaces allow an opportunity to grow their capacity and withstand the various pressure of urban life. The space's value of urban kampung can be seen on several perspective; government's perspective, academic's perspective, NGO's perspective, other stakeholders and urban kampung inhabitants. Each actor will use their own perspective to read urban kampung, that's why the programs express their attention and considerations. So, it is important to discuss the comprehensive way to undertand the layers of urban kampung. The paper will provide a critical review of urban kampung base on several studies on informal settlement and urban kampung. The analysis will focus on evaluation of urban kampung studies by exploring the concept, structures, and components from various layers and perspectives. The study will generate

a new set positioning of urban kampung's study comprehensively that can be used as a reference for future research.

Keywords: *Urban Settlement, urban kampung, concept, component and structure of urban kampung*

Pendahuluan

Perkembangan wilayah perkotaan memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk mencoba peruntungan. Tawaran yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik di perkotaan, dapat terlihat dengan tersedianya fasilitas publik yang lengkap, seperti pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan industri. Fasilitas tersebut disokong pulang dengan kelengkapan infrastruktur yang memadai. Keseluruhan merupakan sebuah kondisi yang dapat mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Kondisi ini mendorong terjadinya urbanisasi, pergerakan manusia dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan. Pergerakan ini harus diimbangi dengan penyediaan ruang untuk kehidupan, terutama permukiman. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin tinggi di perkotaan, membutuhkan luasan permukiman yang semakin meningkat pula. Selain peningkatan luasan juga dibutuhkan beberapa tipe hunian yang disediakan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penduduk perkotaan.

Permukiman dapat dikategorikan menjadi 3 tipe (Agung C. Nugroho, 2009), yaitu (1) permukiman yang terencana (*well-plan development*), (2) permukiman yang tidak terencana (*unplan development*), berupa kampung yang dikenal sebagai pola permukiman asli Indonesia dan (3)

permukiman kumuh/pinggiran (*squatter*), yang menempati tanah-tanah Negara secara ilegal. Dalam pembangunan di Indonesia, secara umum dapat disebut dengan pembangunan formal dan informal. Formal adalah pembangunan yang dilakukan oleh para pengembang dengan sasaran kalangan menengah ke atas, dengan kemampuan ekonomi yang baik. Sedangkan informal merupakan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengembangkan sistem informal (Ernawati, dkk, 2013). Permukiman yang informal merupakan permukiman yang dilakukan pengembang untuk target pasar masyarakat dengan ekonomi tertentu. Sedangkan kampung dan permukiman kumuh tumbuh seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayah perkotaan, terlihat sangat organik dan dinamis.

Menurut PBB (2006) sekitar satu milyar orang tinggal di permukiman informal, yang dikenal dengan istilah permukiman kumuh (*slum*), ilegal (*squatter*). Pemukiman yang dikategorikan sebagai pemukiman informal biasanya karena pemukiman dan pemukinnya tidak mematuhi peraturan dalam terminologi kepemilikan lahan, perencanaan wilayah, desain dan konstruksi yang diberlakukan di wilayah tersebut (Dovey, 2014). Perkembangan kota-kota di Indonesia menunjukkan dominasi pemukiman informal. Dominasi jenis permukiman ini memberikan informasi mengenai

kemampuan masyarakat dalam membangun rumahnya secara mandiri. Status pemukiman informal mendorong masyarakatnya untuk kreatif menghadapi tantangan sekaligus bertahan dari gempuran pembangunan yang formal.

Diskusi mengenai permukiman informal dalam konteks Indonesia, maka kampung di kota menjadi satu tipe permukiman yang perlu mendapatkan perhatian. Ini dibuktikan dengan berbagai penelitian yang menghasilkan teori-teori mengenai kampung kota dari waktu ke waktu. Kajian kampung kota sudah dilakukan dengan beragam cara pandang dan disiplin ilmu.

Kondisi kampung kota akan berubah secara dinamis mengikuti perkembangan. Untuk itu, untuk mengembangkan kajian yang terkini dibutuhkan kritikal review mengenai kampung kota agar tidak terjadi pengulangan pembahasan.

Metode

Paper ini memberikan paparan mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan kampung kota. Penelusuran teori-teori kampung kota dilakukan untuk memberikan wawasan mengenai aspek pembentuk karakter kampung di wilayah perkotaan dan berbagai sudut pandang terhadap kampung kota. Tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai perkembangan kajian kampung kota melalui perbandingan cara pandang dan pemahaman konteks kampung kota, yang saling melengkapi untuk dapat melakukan pembaharuan pandangan terhadap kampung kota. Pada akhirnya, hasil analisis akan memberikan landasan baru untuk

penelitian selanjutnya terkait dengan kampung perkotaan.

Pembahasan

Pengertian

Beberapa peneliti telah memberikan definisi kampung kota sesuai dengan latar belakang keilmuannya, yaitu: merupakan tipologi permukiman kota, yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (Budiharjo, 1992; Guinness, 1986) dengan kondisi fisik yang kurang baik (Budiharjo, 1992), juga tidak tersedia sarana dan prasarana publik yang cukup (Turner, 1972), namun dengan kondisi sosial yang kompak, terpadu dan memiliki solidaritas tinggi (Guinness, 1986), dengan keterikatan pada faktor sejarah yang cukup erat (Newberry, 2008), membuat kampung kota tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai wilayah kumuh (Guinness, 1986), dan secara organisasi tidak terintegrasi dengan lingkungan perkotaan (Geertz, 1965). Kampung kota tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, namun harus secara komprehensif dari berbagai sisi, dengan multidisiplin ilmu. Permukiman di kampung kota yang menjadi bagian dalam kehidupan biologis, kegiatan sosial budaya, pemenuhan ekonomi dan kedudukan politis masyarakat yang tinggal di dalamnya (Silas, 1983). Kampung kota tidak hanya sebagai ruang tempat tinggal, tetapi menjadi ruang yang memberikan identitas penghuninya, entitas dalam kampung dan mengandung simbol-simbol sosial budaya dalam konteks masyarakat yang bertahan dan masyarakat yang beradaptasi dan berkembang.

Teori Perencanaan kota dan kampung kota.

Urbanisasi memberikan tekanan yang berat akan permintaan ruang berhuni

bagi pendatang. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pedatang, baik keterbatasan finansial, keahlian dan pendidikan, kampung kota menawarkan ruang untuk berhuni. Sistem permukiman kampung yang merupakan gabungan pola-pola bermukim desa (Geertz, 1965) dan kota, menjadi alternatif bagi pendatang. Di sisi lain, urbanisasi menuntut adanya hunian yang mencukupi dengan harga terjangkau bagi pendatang. Ruang hunian kota yang menjadi jawaban akan cara bertahan hidup ditempat yang penuh dengan tekanan finansial, sosial dan budaya adalah kampung. Sehingga, kajian mengenai kampung kota tidak dapat terlepas dari dinamika permukiman perkotaan, karena perubahan kondisi kota secara tidak langsung akan mempengaruhi kampung kotanya, demikian pula sebaliknya.



Gambar 1. Kampung dalam perencanaan kota.

Sumber: Analisa Penulis, 2017.

Di sisi lain, keberadaan kampung kota menjadi penting karena lokasinya sangat strategis dalam wilayah kota. Kampung kota akan membentuk wajah dari kota dan sebaliknya, wajah kota akan memberikan kontribusi pada karakter kampung kota yang tumbuh di

dalamnya. Teori perencanaan kota telah bergerak dari kajian yang menitik-beratkan pada kajian fisik ke kajian sosial (Friedman, 1987). Pergeseran teori ini didorong oleh kesadaran akan fokus penelitian adalah penghuni, warga masyarakat dan komunitas sebagai pengguna ruang-ruang fisik yang akan disediakan dan dibangun.

Rasa solidaritas yang kental di warga kampung kota memberikan peluang untuk melakukan perancangan dengan pendekatan partisipatoris. Formulasi yang ditekankan oleh Friedman (1987) adalah pengetahuan lokal masyarakat berkolaborasi dengan pengetahuan keilmuan perencanaan dari para ahli dalam menentukan teori dan penarapan perencanaan dan perancangan yang sesuai dengan konteks masyarakat tertentu. Dengan model pendekatan ini, setiap aktor akan mendapatkan keuntungan melalui kegiatan belajar bersama (*mutual learning*).

Pola-pola berhuni di kampung memberikan gambaran karakter penghuninya. Layer informasi kemasyarakatan dapat dilihat dari dinamika kehidupan kampung; pilihan dalam prioritas pembangunan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, ruang-ruang yang dipertahankan dan pemanfaatan aset bersama. Kesempatan yang digunakan oleh masyarakat kampung kota untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan akan meningkatkan kualitas masing-masing partisipan dalam memikirkan, mendiskusikan dan pengambilan keputusan, mengevaluasi dan mengembangkan kampungnya sendiri. Pemikiran bahwa perencanaan kota tidak lagi 'untuk' masyarakat, tetapi 'oleh' masyarakat.

Kampung kota adalah peluang untuk mendapatkan karakter pembangunan

kota yang khas milik kota Indonesia. Karakter yang mengandung kearifan lokal dengan mengangkat potensi yang dimiliki masyarakat setempat. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, kampung kota menjadi sebuah kajian yang memberikan informasi mengenai kekuatan masyarakat yang merupakan potensi kuat dalam proses perencanaan, memberikan karakter dan lokalitas yang ada.

Rentang Kajian Kampung Kota

Posisi kampung dalam geografi kota yang mengalami aglomerasi dapat dibagi menjadi 3 kategori (Kraussc dalam Budiarto, 2003), yaitu:

1. Kampung yang berlokasi di tengah kota (*inner city*), merupakan kampung yang berkembang di pusat kota, menjadi penyedia jasa kota (Newberry, 2008).
2. Kampung di wilayah perbatasan kota (*periphery city*), merupakan kampung yang mengisi batas kota, umumnya masih terdapat ruang terbuka, dengan kepadatan sedang.
3. Kampung di wilayah luar kota (*woodland*), kampung yang berada di luar wilayah administrasi kota, namun dinamika pertumbuhannya berlangsung seiring dengan dinamika pusat kotanya.

Kraussc menuliskan temuan ini sebagai bagian dari temuan disertasinya pada tahun 1975, yang kemudian banyak dikutip oleh peneliti pada masa setelahnya. Konteks penelitian tersebut adalah kota Jakarta, yang kemudian pada tahun 2003 digunakan kembali oleh Budiarto. Temuannya adalah mengenai kelenturan kampung dalam konteks sosial kultural, pemanfaatan ruang, dan konfigurasi ruang kampung kota. Catatan penting yang dapat diambil

adalah meletakkan kampung sebagai pengamatan global yang menghubungkannya dengan jaringan kota dan pengamatan dalam skala lokal yang membangun pengetahuan lokal mengenai potensi sumberdaya yang ada di kampung kota.

Kampung juga dapat ditelaah dari lokasinya dan daya dukungnya terhadap kota. Menurut Yudohusodo, dkk. (1991, dalam Widjaja, 2013), kampung dapat dikategorikan menjadi 5 jika dilihat dari lokasi dan daya dukungnya, yaitu:

1. Kampung-kota dengan lokasi yang strategis dalam mendukung fungsi kota. Kampung kote tipe ini mendapatkan keuntungan peningkatan pendapatan dari lokasi yang strategis.
2. Kampung-kota dengan lokasi yang kurang strategis dalam mendukung fungsi kota.
3. Kampung-kota yang lokasinya tidak strategis dan menurut RTRK merupakan zona permukiman.
4. Kampung-kota yang lokasinya menurut RTRK tidak merupakan zona permukiman.
5. Kampung-kota yang berada di zona bahaya, seperti; di bantaran sungai, jalur rel kereta api, jalur SUTET.

Yudohusodo (1991, dalam dalam Widjaja, 2013) memberikan gambaran bahwa lokasi kampung kota menjadi faktor penting dalam penentuan perkembangan sebuah kampung terhadap kota. Kampung kota yang dengan lokasi yang strategis akan memiliki kemampuan untuk berkembang dan mengikuti dinamika kota. Sedangkan kampung yang lokasinya tidak strategis dan cenderung

pada daerah berbahaya tidak akan lambat dalam mengikuti perkembangan kota, karena akses yang tidak ada dan kesempatan yang tidak tersedia.

Kampung juga dapat dilihat dari kontennya; yaitu pengisi kampung. Menurut Sullivan (1986) di kampung kota dapat ditemukan grup-grup yang ada dalam masyarakat, yang lebih membentuk karakter fungsi daripada katakter ruang. Berdasarkan pemikiran ini, menurut Sullivan kampung dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Kampung yang dibentuk oleh permukiman dan kantor dari pangeran dan bangsawan keraton. Para kerabat keraton merupakan perpanjangan fungsi administrasi dan sebuah upaya pemantauan perkembangan yang ada di masyarakat.
2. Kampung yang dibentuk oleh beberapa etnis dari luar wilayah keraton, seperti permukiman untuk warga Belanda, para pedagang seperti kampung Pecinan, Madura, Arab.
3. Beberapa ruang yang yang dihuni oleh beragam buruh, seniman dan tukang.

Kota yang menjadi fokus penelitian Sullivan (1986) adalah kota Yogyakarta. Konteks kota Yogyakarta sebagai kota yang memiliki sejarah kerajaan/kesultanan, keunikan sosial budaya serta perkembangan pendidikan yang khas mendorong konten kampung menjadi sangat beragam karena warga yang tinggal di dalamnya; terkait dengan pekerjaan, strata sosial dan pendidikan.

Dalam bahasan Sullivan (1986), kampung tidak memberikan indikasi batas wilayah administrasi kewilayahan. Sehingga pada masa kini,

jika melakukan pemetaan, maka dapat ditemukan tumpang tindih antara batas wilayah kampung (wilayah yang berkembang berdasarkan kampung yang terbentuk secara historis dan wilayah yang ditetapkan dalam batas-batas administrasi yang ditetapkan pada masa kini). Sebagai contoh, misalnya, Ngampilan. Kata Ngampilan pada awalnya merupakan sebuah kediaman petugas 'ngampil', yang pekerjaannya adalah menyiapkan segala kebutuhan upacara di keraton. Ketika ditelusuri, maka akan ditemukan: (1) Kecamatan Ngampilan, salah satu kelurahan yang ada di dalamnya adalah (2) kelurahan Ngampilan, dan di dalam kelurahan tersebut ada beberapa RT dan RW yang masuk dalam (3) Kampung Ngampilan. Dalam kenyataannya, RT dan RW di dalam kampung Ngampilan pun berbeda karakternya, yang disebabkan oleh perbedaan program pemerintah kota yang diterapkan tidak sama, potensi dan pengembangan potensi wilayah yang berbeda, pola-pola permukiman yang berkembang dinamis, masyarakat dan tingkat partisipasi berbeda, dan topografi lahan yang berbeda pula.

Kepemilikan tanah dan rumah di kampung kota memberikan karakter permukimannya. Pada umumnya hunian dengan kepemilikan tanah yang legal adalah rumah yang permanen dan semi permanen, sedangkan rumah dengan kepemilikan tanah sewa dan illegal adalah rumah yang tidak permanen. Pertumbuhan kampung kota ditandai dengan penambahan jumlah rumah dan bangunan lainnya, yang menambah kepadatan lingkungan dan memberikan citra lingkungan kumuh. Ruang-ruang dibangun berdasarkan kebutuhan dan pemahaman pragmatis (Widjaya, 2013) mengenai bahan,

luasan dengan teknik membangun yang tidak standar.

Pemerintah memandang kampung kota dari sisi kumuh dan miskin. Kepadatan kampung yang memunculkan gambaran kekumuhan dan kemiskinan di lingkungan kampung kota. Program-program yang direncanakan dan diterapkan di kampung kota bertujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat kekumuhan, seperti (1) kondisi jalan, (2) rumah tidak layak huni, (3) kondisi talud (wilayah tepi sungai), (4) Kondisi MCK (jamban), (5) ketersediaan IPAL dan (6) ketersediaan air bersih (layak) dikonsumsi.

Kemiskinan kampung kota pun mendapat perhatian dari pemerintah dan dalam perjalanannya didapatkan bahwa bantuan keuangan harus diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di dalam kampung kota. Organisasi-organisasi dalam skala kampung didukung untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan keluarga, keuangan kelompok (arisan) dan keuangan bantuan perbaikan lingkungan.

Tabel 1. Program pemerintah untuk kampung kota

No.	Program	Fokus Kegiatan
1.	KIP (<i>Kampung Improvement Program</i>)	Kondisi fisik
2.	P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)	Perbaikan ekonomi
3.	PNPM-Mandiri (Program Nasional)	Perbaikan SDA dan ekonomi

No.	Program	Fokus Kegiatan
	Pemberdayaan Masyarakat Mandiri)	
4.	PLPBK (Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas)	Kondisi fisik (lingkungan)
5.	P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Penanggulangan Kawasan Kumuh
6.	KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	Penanggulangan Kawasan Kumuh

Sumber: Analisa Penulis, 2017.

Kampung kota dalam berbagai cara pandang di atas memberikan beberapa layer yang harus diperhatikan dalam kajian kampung kota, yaitu: (1) lingkungan alam, (2) lokasi terhadap kota, (3) peran dalam perkembangan ekonomi kota, (4) legal formal kepemilikan rumah, (5) bencana yang secara berulang terjadi, (6) program pemerintah dan target kegiatan, (7) SDA, (8) sejarah dan budaya serta (9) kearifan lokal.

Dua Sisi Kampung Kota

Beberapa tulisan mengenai kampung kota dan permukiman informal kota dapat dibagi menjadi dua fokus pembahasan. Yang pertama adalah tulisan yang memberikan gambaran kondisi yang serba terbatas dan tidak memenuhi kode standart struktur, dan yang kedua pembahasan mengenai kemampuan kampung kota tetap bertahan dalam keterbatasan, bahkan untuk beberapa kasus tidak hanya bertahan, tetapi kampung yang memiliki karakter yang tangguh dan mampu menjadi wajah kreatif sebuah kota.

Dalam beberapa tulisan yang berkaitan dengan kampung perkotaan, diberikan

informasi kondisi kampung yang tidak memenuhi standart (Dovey, 2015), kondisi fisik yang *degenerative* (Maharika, 2011), dihuni oleh masyarakat transisi dari sektor pertanian desa menjadi warga perkotaan (Setiawan, 2010), kampung memiliki kerentanan terhadap bencana banjir, peningkatan permukaan air laut dan angin ribut (Ernawati, dkk., 2013).



Gambar 2. Dua sisi kampung yang membentuk entitas, fungsi dan simbol kampung kota.

Sumber: Analisa Penulis, 2017.

Bertolak belakang dengan kondisi yang penuh dengan ketidaklengkapan, serba kekurangan dan keterbatasannya, kampung juga memiliki sisi yang menggambarkan kekuatannya sebagai ruang yang kompak (*compact*) dalam skala ruang dan akses, dalam pemanfaatan ruang-ruang publik dan bisa menjadi pilihan tempat bermukim segala lapisan masyarakat (Roychansyah, 2011), kondisi informal yang mengendalikan kemiskinan, memungkinkan untuk menggunakan material daur ulang dan skala ruang yang akrab bagi penghuninya (Dovey, 2015), tempat untuk proses belajar dan beradaptasi menjadi manusia perkotaan bagi pendatang (Setiawan, 2010), memberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan (Newberry,

2008) dan kampung mengisi ruang kota, sejak dari perbatasan administrasi hingga ke pusat kota (Budiarto, 2003).

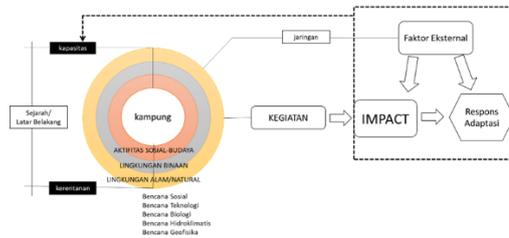
Dari beberapa tulisan di atas, maka peran kampung perkotaan dalam konteks kota di Indonesia adalah sebagai ruang hunian bagi warga kota. Hal ini menjadi peran utama, yang kemudian berkembang menjadi beberapa peran yang lainnya, misalnya: sebagai (1) penyedia jasa berupa tempat kos (Rahmi, dkk., 2001) dan tenaga kerja (Newberry, 2008), (2) penyedia ruang bagi industri rumahan, yang memproduksi makanan dan pernak-pernik khas kampung. Kehidupan di kampung adalah pusran dari sumber daya; seperti: keuangan, bantuan dan jasa (Newberry, 2008). Putaran keuangan, pola-pola bantuan dan jasa berjalan secara konvensional dan membangun jaringan kedekatan/keintiman di antar tetangga. Jaringan ini membentuk 'etika' kehidupan, yang menjaga hubungan antara satu dan lainnya.

Peran kampung dan kondisi yang menggambarkan kerentanan kampung dan kapasitas kampung perkotaan, yang maka keduanya berlaku sebagai dua sisi yang berlawanan, tapi membentuk entitas yang memiliki ciri khas yang kuat, fungsi yang telah berjalan dari waktu ke waktu dan simbol yang dapat ditangkap dan mengatur perilaku dalam ruang-ruang kampung perkotaan.

Kesimpulan

Kampung perkotaan di Indonesia memberikan gambaran yang kompleks; fakta-fakta yang bertolak belakang, namun membentuk entitas, nilai dan simbol yang khas. Untuk itu dibutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk mendapatkan nilai-

nilai lokal yang ada di permukiman informal yang mendukung ketahanannya dalam berfungsi sebagai ruang berhuni, ruang ekomoni, ruang sosial dan budaya serta ruang belajar beradaptasi dengan kehidupan kota.



Gambar 3. Posisi kampung kota bertahan dalam dinamika kota.

Sumber: Analisa Penulis, 2017

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kajian kampung adalah pertama, kampung kota dilihat dari lingkungan alam yang melingkupinya. Aspek ini akan memberikan informasi bagaimana pertumbuhan kampung beradaptasi dengan lingkungan alam dan membentuk karakter yang khas karena lokasinya. Contohnya; pola-pola ruang yang terjadi karena kontur tanah, pola-pola sumber air bersih dan ruang-ruang terbuka.

Yang kedua adalah sejarah yang berkaitan dengan perkembangan lingkungan binaan kampung kota. Kekuatan dari sejarah perkembangan kampung dan kemampuan kampung merespon kebutuhan kekinian banyak memunculkan kampung-kampung yang bergerak pada industri kreatif, kampung wisata dan kampung edukasi.

Ketiga, kampung kota memiliki kekhasan interaksi antar penghuninya, sehingga kampung menjadi tempat yang dituju oleh para pendatang. Budaya yang ada di kampung kota dapat memberikan simbol akan keterbukaan dan penerimaan pada pendatang, namun pada sisi lain dalam

pula diterjemahkan sebagai bagian yang tertutup dan tidak dapat dibuka dengan mudah bagi orang luar.

Keempat, citra kampung kota yang kumuh dan miskin sejak lama telah menjadi perhatian pemerintah, untuk itu diperlukan dukungan dari para akademisi dan investor untuk mendampingi kampung kota, dengan semangat partisipatif.

Kelima, kajian kampung kota harus dilihat dalam skala yang sesuai dengan konteksnya agar kampung-kampung tersebut menjadi ruang tinggal yang aman bagi warganya. Catatan mengenai bencana yang secara periodik terjadi harus ditelaah dan dicarikan solusi manajemen kebencanaannya. Sehingga kampung kota, dengan segala keterbatasannya ditambah pula dengan segala kekuatannya tidak hanya dilihat dari sisi lingkungan fisik dan sosial budaya, namun terukur pula kesiapannya dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Pelayanan yang disediakan oleh kampung kota pun akan dapat dilihat dalam berbagai skala. Lokasi-lokasi yang strategis memberikan kesempatan untuk memberikan pelayanan lebih luas, seperti (1) kampung-kampung yang berkembang berbasis pariwisata, contohnya; Kampung Sosrowijayan dan Kampung Prawirotan di Yogyakarta, (2) kampung-kampung yang berkembang karena industri rumah tangga, contohnya; kampung Ngampilan di Yogyakarta. Sedangkan kampung-kampung yang tidak strategis dapat dikembangkan dengan meningkatkan kualitas lingkungan dan menetapkan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan, contohnya; kampung hijau Glintung di Malang, kampung berkelanjutan Karang Waru di Yogyakarta.

Dalam mengkaji kampung, tidak hanya warga kampung yang mendapatkan pengetahuan dan program peningkatan sumber daya, namun pemerintah juga harus, akademisi dan pihak pemodal/investor harus melihat potensi yang berlapis. Sehingga kampung kota memiliki jaringan yang baik dan kokoh dalam membangun sumberdaya, memiliki kemampuan dalam berpartisipasi dan memiliki kemampuan dalam menentukan prioritas dalam pengambilan keputusan perencanaan pengembangan kampung kota.

Referensi

- Agung C. Nugroho. 2008. Kampung Kota sebagai Sebuah Titik Tolak Dalam Membentuk Urbanitas dan Ruang Kota Berkelanjutan, *Jurnal Rekayasa Vol.13 No.3 Desember 2009*, Hal 209-218.
- Budiarto, L.2003. Dweller and Stranger: Socio Culture Entity, Space Use and Spatial Configuration in kampung settlements of Jakarta Indonesia, *Proceeding-4th International Space Syntax Symposium*, London.
- Budiharjo, Eko. 1992. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, Alumni.
- Dovey, Kim. 2015. Sustainable Informal Settlements?, *PROCEDIA – Social and Behavioral Sciences 179*, p. 5-13.
- Ernawati, Rita., Santosa, H.R., Setijanti, Purwanita. 2013. Facing Urban Vulnerability through Kampung Development, case study of kampungs in Surabaya, Indonesia. *Humanities and Social Sciences, Vol.1*, p. 1-6. DOI: 10.11648.
- Friedmann, Jon. 1987, “*Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*”, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Geertz, C. 1965. *The Social History of an Indonesian Town*, Greenwood Press Publisher, Westport, Connecticut.
- Guinness, Patrick. 1986. *Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung*, Oxford University Press, Oxford and New York.
- Maharika, Ilya Fadjar. 2011. Rarchitecture of Kampung’s Abstract Machine. *Conference: World Congress of Architecture UIA Tokyo*, At Tokyo, Japan.
- Newberry, Jan. 2008. Double Space: Abstract Labour in Urban Kampung, *Anthropologica 50 (2)*, p. 241-254.
- Rahmi, D.H., Wibisono, Bambang H., Setiawan, Bakti. 2001. Rukun and Gotong Royong: Managing Public Places in an Indonesian Kampung, *Public Places in Asia Pasific Cities*, P.119-134, Kluwer Academic Publishers.
- Roychansyah, M.S. 2008. Compact City Development Model in Indonesia: A Kampung Orientation Development. *Proceeding of International Seminar on Green Architecture and Environment: Towards Green Compact Cities*, October, 14. Hasanuddin University, Makasar, Hal. 35-49.
- Silas, Johan. 1983. Beberapa Pemikiran Dasar tentang Perumahan dan Perkampungan di Indonesia, *Makalah dalam Diskusi Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Indonesia*, Bandung. Vol. 29.

- Setiawan, Bakti. 2010. *Kampung Kota dan Kota Kampung: Tantangan Perencanaan kota di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Perencanaan Kota UGM, Yogyakarta. 28 Oktober.
- Sullivan, John. 1986. Kampung and State: The Role of Government in the Development of Urban Community in Indonesia. *Indonesia* No. 41 April, p.63-88.web.
- Widjaya, Pele. 2013. Kampung-Kota Bandung, Graha Ilmu Yogyakarta.